



Rabu, 3 Februari 2021

1. **Kejaksanaan Didorong Terapkan Pasal TPPU**
Kompas, hal. 2 / 03-02-2021

Kejaksanaan Didorong Terapkan Pasal TPPU

Pemerintah menjamin uang nasabah PT Asabri (Persero) tidak hilang. Kejagung akan berupaya agar aset perusahaan tersebut dipulihkan.

JAKARTA, KOMPAS — Kejaksanaan Agung mendorong untuk menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan dana investasi PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Asabri (Persero). Penggunaan pasal TPPU penting untuk memaksimalkan pemulihan kerugian negara.

Sementara itu, di tengah proses hukum yang dilakukan Kejaksanaan Agung (Kejagung), pemerintah menjamin dana nasabah yang mayoritas merupakan anggota TNI/Polri tidak akan hilang.

Sebelumnya, Kejagung mengumumkan delapan tersangka dalam kasus yang berpotensi mengakibatkan kerugian hingga Rp 23,7 triliun tersebut. Mereka terdiri dari lima pejabat PT Asabri periode 2021-2019 dan tiga orang dari swasta.

Wakil Direktur Visi Integritas Emerson Yuntho mengatakan, Kejagung agar menuntaskan kasus PT Asabri hingga ke akarnya. Semua pihak yang terlibat harus diproses hukum.

Tak hanya dengan pasal korupsi, Emerson juga meminta agar Kejagung menerapkan pasal pencucian uang. Dengan demikian, kejaksaan bisa merampas aset para tersangka yang disamakan asal-usulnya. Tidak hanya itu, aset milik keluarga tersangka pun bisa diamankan.

"Kalau tidak dijerat dengan pasal TPPU, trennya koruptor akan memilih tidak membayar denda, tetapi diganti dengan hukuman kurungan. Menjerat pelaku dengan pasal TPPU penting dilakukan agar aset bisa

dikembalikan ke kas negara sesuai dengan nilai kerugian yang dialami," kata Emerson.

Ia pun meminta Menteri BUMN Erick Thohir lebih memperhatikan modus korupsi PT Asabri dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang relatif mirip. Jangan sampai modus serupa diikuti oleh BUMN lain di bidang yang sama. Oleh karena itu, Kementerian BUMN harus melakukan evaluasi menyeluruh dan menutup celah-celah pemicu korupsi.

Dalam kasus Asabri, Emerson mempertanyakan mudahnya pembelian saham investasi dan reksadana oleh jajaran direktur perusahaan tersebut. Pembelian dapat dilakukan secara langsung tanpa melalui analisis fundamental dan teknikal melalui jasa manajer investasi.

"Dua kasus terakhir, yaitu PT Jiwasraya dan PT Asabri, kerugiannya sangat besar. Bahkan, lebih besar dari kasus-kasus yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini harus dijadikan sebagai dasar evaluasi menyeluruh untuk perusahaan BUMN asuransi dan perbankan," tutur Emerson.

Masih ditelaah

Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Harry Azhar Azis, ketika dihubungi mengatakan, dalam kasus PT Asabri, BPK telah menerima permintaan audit investigasi dari Kejagung. Saat ini permintaan tersebut dalam proses pelaporan dan permintaan penghitungan kerugian negara (PKN).

"(Permintaan) Dari kejaksaan

tanggal 15 Januari lalu ke BPK, baru dalam tahap proses penelaahan," kata Harry.

Adapun dalam kasus tersebut, Kejagung menyebutkan, pada 2012 sampai 2019, beberapa direksi dan pejabat PT Asabri melakukan kesepakatan dengan pihak luar yang bukan merupakan konsultan investasi ataupun manajer investasi, yaitu HH, BTS, dan LP. Kesepakatan itu untuk membeli atau menukar saham dalam portofolio Asabri dengan harga yang telah dimanipulasi sehingga kinerja portofolio Asabri terlihat baik.

Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Togar Pasaribu mengatakan, sejak adanya kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya, pihaknya telah mengimbau anggota AAJI agar tidak mengelola lagi atau berhati-hati mengelola sumber pendanaan yang terkait dengan keuangan negara atau badan usaha milik negara. Hal itu merupakan antisipasi agar kasus serupa tidak terjadi.

Meski terjadi kasus korupsi di Jiwasraya yang kini disusul dengan perkara Asabri, menurut Togar, hal itu tidak terlalu berpengaruh pada industri asuransi jiwa secara keseluruhan. Sebab, kebanyakan anggota AAJI adalah perusahaan patungan antara perusahaan dalam negeri dan luar negeri.

Terlepas dari perkara yang kini sedang terjadi, ia menyarankan agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memaksimalkan pengawasan ataupun perlindungan terhadap konsumen sesuai peraturan yang ada. Sebab,

OJK adalah otoritas yang memiliki kewenangan itu.

Uang nasabah aman

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menjamin proses hukum akan dijalankan dalam kasus dugaan korupsi dana PT Asabri. Ia juga menjamin bahwa uang milik nasabah yang mayoritas merupakan anggota TNI/Polri itu tidak akan hilang.

"Korupsinya akan terus diadili, tetapi jaminan kesejahteraan para prajurit yang dijanjikan yayasan itu dijamin oleh pemerintah agar tidak hilang. Kejaksanaan Agung sedang mengupayakan itu semua," tutur Mahfud.

Ia mengatakan, meskipun dua tersangka dalam kasus korupsi PT Asabri sama dengan kasus korupsi PT Jiwasraya, obyek, barang bukti, dan asetnya berbeda. Kejagung telah memastikan hal itu. Kejagung juga sedang mengupayakan agar aset yang ada dipulihkan.

Dalam waktu dekat, Kejagung akan menyita beberapa aset dalam kasus tersebut. Jika ternyata aset yang dipulihkan tidak sepadan dengan nilai kerugian negara, hal itu akan dibicarakan lebih lanjut. Negara memastikan prajurit TNI ataupun anggota Polri tidak boleh dirugikan.

"Mari masyarakat ikut mengawal dengan sebaik-baiknya. Para prajurit TNI/Polri tetap tenang. Negara akan memberikan pelayanan kepada anda karena ini uang tabungan anda di Yayasan Asabri," ujarnya.

(NAD/DEA)

2. Industri asuransi jiwa sudah bayar klaim Covid-19 sebanyak Rp 642,90 miliar [Kontan.co.id](https://kontan.co.id) / 02-02-2021

KEUANGAN / ASURANSI

Industri asuransi jiwa sudah bayar klaim Covid-19 sebanyak Rp 642,90 miliar

Selasa, 02 Februari 2021 / 06:30 WIB



Reporter: Ferrika Sari | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Industri asuransi jiwa sudah membayarkan klaim terkait Covid-19 kepada para nasabah. Hingga Oktober 2020, total klaim yang dibayarkan industri asuransi jiwa mencapai Rp 642,90 miliar, menurut data Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI).

"Angka klaim itu berasal dari 8.800 pemegang polis," kata Direktur Eksekutif AAJI Togar Pasaribu kepada Kontan.co.id, Senin (1/2).

Pembayaran klaim tetap dijalankan perusahaan asuransi meski pemerintah menyatakan bahwa Covid-19 merupakan pandemi. Di sisi lain, pembayaran klaim itu juga menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat berasuransi meningkat selama pandemi.

Menurut Togar, masyarakat akan tetap mencari asuransi kesehatan walau pemerintah memberikan vaksin secara gratis. Alasannya, mereka membutuhkan perlindungan tambahan karena virus corona belum bisa hilang 100% walau sudah ada vaksin.

"Masyarakat sudah tahu, Covid-19 tidak bisa hilang karena sewaktu - waktu bisa terkena lagi. Jadi, ada sebagian masyarakat perlu penanganan secara cepat, dan kamar perawatan VIP melalui asuransi komersil," jelas Togar.

Hingga saat ini, sudah banyak pemain asuransi memberikan perlindungan terhadap risiko Covid-19. Walau begitu, porsi asuransi kesehatan secara industri belum begitu besar yaitu 10% dari total premi.

Salah satu pemain, PT Asuransi Jiwa Sequis Life (Sequis Life) telah membayarkan klaim terkait Covid-19 senilai Rp 53,87 miliar di 2020. Ini merupakan bagian komitmen perusahaan memberikan perlindungan kepada nasabah.

"Iya (kami terus meng-cover asuransi Covid-19) dan membayarkan klaim karena ini komitmen kami," ungkap President Director & CEO Sequis Life Tatang Widjaja.

Sequis Life dinilai memberikan beberapa keunggulan dalam perlindungan terhadap Covid-19. Diantaranya, mengkaver pasien orang tanpa gejala (OTG) dan layanan isolasi mandiri.

Selain itu, perusahaan juga akan membayarkan sejumlah biaya perawatan dengan menyerahkan surat dari dokter yang merawat mulai dari biaya obat - obatan, test darah, konsultasi dokter dan rontgen thorax.

"Kami yang pertama memberikan pelayanan klaim untuk *self isolation* semenjak pertengahan tahun lalu dan sekarang banyak para perusahaan asuransi jiwa menawarkan hal yang serupa," lanjutnya.

Selain itu, PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia juga telah membayarkan 274 klaim terkait Covid-19 senilai Rp 28,6 miliar hingga Oktober 2020. Sementara total klaim yang telah dibayar Rp 526,7 miliar yang merupakan gabungan dari manfaat meninggal dunia, kesehatan dan penyakit kritis.

"Dengan adanya proteksi, keluarga terlindungi dan nasabah bisa tetap fokus dalam menjalani pengobatan dan proses penyembuhan. Kami juga terus mendorong inovasi untuk mendampingi dan memberikan kemudahan bagi nasabah," ujar Direktur dan Chief Operation Officer Generali Jutany Japit.

3. [Foto] Perubahan Susunan Direksi AJB Bumiputera
Bisnis Indonesia, hal. 15 / 03-02-2021

FINANSIAL 15

■ PERUBAHAN SUSUNAN DIREKSI AJB BUMIPUTERA



Bisnis/Himawan L. Nugraha

Nasabah melakukan unjuk rasa di halaman kantor AJB Bumiputera 1912 di Jakarta, belum lama ini. Susunan direksi Asuransi Jiwa Bersama atau AJB Bumiputera 1912 telah berubah sejak Januari 2021. Operasional perseroan berjalan sesuai dengan keputusan Dewan Komisaris, salah satunya merupakan rangkap jabatan Komisaris Utama dan Direktur Utama. Hal

tersebut terungkap saat para pemegang polis mendatangi Wisma Bumiputera, Kantor Pusat Bumiputera pada Selasa (2/2). Aksi unjuk rasa yang berlangsung di depan kantor itu tidak dapat dilanjutkan, sehingga perwakilan pemegang polis meminta untuk bertemu dengan perwakilan manajemen.

KASUS KORUPSI ASABRI

Deja Vu, Kasus Asabri Mirip Jiwasraya

Kinerja Asabri 2016-2019

No	Keterangan	2016	2017	2018	2019
1	Premi	1.38	1.39	1.39	1.47
2	Beban Klaim	(1,15)	(1,34)	(1,35)	(1,37)
3	Beban kenaikan manfaat polis masa depan	(1,61)	(800 M)	(340 M)	(1,33)
4	Hasil Investasi	1.67	1.85	1.31	(4,94)
5	Laba (rugi) setelah pajak	110 M	940 M	850 M	(6,21)

Keterangan: Rp triliun

Sumber: Laporan Keuangan Asabri

Ferrika Sari

JAKARTA. *Deja vu*. Kejaksan Agung seperti mengulang penyidikan kasus korupsi Asuransi Jiwasraya di tubuh PT Asabri. Mirip Jiwasraya, sejumlah eks petinggi Asabri ikut dijadikan tersangka.

Dua nama terpidana di kasus Jiwasraya, Benny Tjokrosaputro Direktur Utama PT Hanson International Tbk dan Komisaris Utama PT Trada Alam Heru Hidayat, juga disebut-sebut masuk daftar tersangka kasus dugaan korupsi di Asabri (*lihat infografis*). Bahkan, jaksa juga menyebutkan, modus para tersangka mirip kasus Jiwasraya.

Tahun 2012 hingga 2019, para eks pejabat Asabri diduga menjalin kesepakatan dengan para swasta untuk mengatur dan mengendalikan investasi saham dan reksadana.

Pada periode itu, manajemen Asabri diduga menjalin kesepakatan membeli atau menukar saham portofolio Asabri dengan saham afiliasi para swasta. Menurut jaksa, setelah menjadi milik Asabri, saham-saham tersebut ditransaksikan atau dikendalikan oleh ketiga pihak itu dan disepakati oleh direksi.

Saham-saham yang telah dijual di bawah harga perolehan selanjutnya ditransaksikan atau dibeli kembali dengan *nominee* tiga tersangka dari kubu swasta. Dugaan lain, saham-saham itu dibeli kembali Asabri melalui *underlying* reksadana yang dikelola oleh manajer investasi.

Hasil audit sementara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), transaksi itu diduga merugikan negara Rp 23,73 triliun. "Asabri rugi dan menguntungkan pihak terafiliasi (tersangka swasta)," ujar Leonard Eben Ezer

Daftar dan Inisial Tersangka Dugaan Korupsi Asabri



1. **ARD** (Direktur Utama Asabri Periode 2012-2016)
2. **SW** (Direktur Utama Asabri Periode 2016-2019)
3. **HS** (Direktur Asabri Periode 2013-2019)
4. **BE** (Direktur Keuangan Asabri Periode 2008-2014)
5. **IWS** (Kepala Divisi Investasi PT Asabri Periode Juli 2012-Januari 2017)
6. **LP** (Direktur Utama Prima Jaringan)
7. **BTS** (Direktur Utama PT Hanson International Tbk/MYRX)
8. **HH** (Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk/TRAM)

Sumber: Kejaksaan Agung

Simanjuntak, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Selasa (2/2).

Kuasa Hukum Sonny Widjaja, Ferry Juan, membantah keterlibatan kliennya. "Transaksi dilakukan pejabat lama, bukan Sonny," ujarnya.

Kubu Heru juga membantah

Putusan Terpidana Kasus Jiwasraya



1. **Hendrisman Rahim**, Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya periode 2008-2018 Vonis Penjara seumur hidup
2. **Hary Prasetyo**, Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya periode 2008-2018 Vonis Penjara seumur hidup
3. **Syahmirwan**, Mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Vonis penjara seumur hidup
4. Direktur PT Maxima Integra, **Joko Hartono Tirta**. Vonis penjara seumur hidup
5. **Benny Tjokrosaputro**, Direktur Utama PT Hanson International Tbk Vonis penjara seumur hidup dan membayar uang pengganti Rp 6 triliun
6. **Heru Hidayat**, Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera vonis penjara seumur hidup dan membayar uang pengganti Rp 10,72 triliun

terlibat, meski akan mengikuti proses pemeriksaan. "Tapi klien kami belum pernah diperiksa sebagai tersangka," kata Kresna Hutaauruk, pengacara Heru Hidayat.

Polemik AJB Bumiputera Kian Memanas

Nasabah bentuk BPA dan mengambilalih manajemen

Maizal Walfajri

JAKARTA. Polemik AJB Bumiputera semakin panjang. Kesal tak kunjung ada jalan keluar pembayaran klaim 3,9 juta nasabah, pemegang polis AJB Bumiputera menyebutkan pembubaran pengurus perusahaan. Mulai dari direksi, komisaris hingga badan perwakilan anggota (BPA).

Salah satu pemegang polis, Jaka Irwanta menyatakan pemegang polis sepakat pembubaran manajemen karena menganggap hasil sidang BPA tidak kourum. Apalagi rapat melalui platform video konferensi zoom itu tak mendapatkan izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK). "Manajemen tidak ada agenda atau usaha menguraikan klaim. Direksi merangkap komisaris," ujar Jaka kepada KONTAN, Selasa (2/2).

Para pemegang polis membentuk BPA periode 2021-2026. Rencananya, ada calon direksi dan komisioner yang lebih profesional. "Serta rencana program kerja penyelamatan pembayaran klaim. Kita ajukan *fit proper test* manajemen ke OJK," ujar Jaka.

Deputi Komisioner Humas dan Logistik OJK, Anto Prabowo menyatakan, OJK berharap upaya para pemegang polis harus dalam koridor keten-

tuan dan upaya konstruktif. Sebagai usaha, pemegang polis merupakan pemegang saham. "Sehingga aspirasi mereka harus tersalurkan dengan baik," ujar Anto. OJK sedang menyiapkan langkah lanjutan untuk menyelesaikan polemik pembayaran klaim.

KONTAN belum berhasil menghubungi manajemen dan Ketua BPA Bumiputera Nurhasanah. Manajemen sempat menjanjikan membayar klaim pada akhir tahun lalu.

Sementara Fien Mangiri, koordinator Nasabah Korban Gagal Bayar Bumiputera di Jabodetabek dan Jawa Barat menyatakan, fokus meminta polis dibayar utuh 100%. "Kami tidak mau terlibat urusan manajemen," katanya.

BPA dan pemegang polis adalah kunci di kasus ini. Pasal 38 Anggaran Dasar AJB bisa meminta sidang luar biasa BPA/Rapat Umum Anggota (RUA). Namun BPA tak kunjung mengadakan sidang. ■

Riwayat Singkat Polemik AJB Bumiputera

- Pokok Persoalan AJB Bumiputera tidak bisa membayar klaim nasabah yang ada menagih sejak 2017
- OJK meminta manajemen Bumiputera segera menyelesaikan proses klaim
- Januari 2020 manajemen Bumiputera mau menjual aset berupa Hotel Bumi di Surabaya serta tanah di TB Simatupang, Jakarta. Sedangkan skema, lewat kerjasama operasi (KSO) berupa aset di Hotel Bumi Wiyata Depok, tanah di Warung Buncit, Wisma bumiputera, tanah di Setia Budi, Menteng dan Kemayoran, Jakarta.
- Januari 2020 Pemerintah mengeluarkan aturan Anggota BPA tidak boleh dari pengurus partai politik, kepala daerah maupun anggota legislatif.
- Juli 2020 BPA menunjuk Faizal Karim sebagai Plt Direktur Utama, merangkap Direktur Keuangan dan Investasi Bumiputera. Wirzon Sjofoyan menjadi Direktur Kepatuhan.
- September 2020 OJK menyebut aset Bumiputera tak cukup menanggung klaim nasabah. Jatuh tempo sampai akhir tahun 2020 diperkirakan Rp 9 triliun. Tahun 2021 ada klaim hingga Rp 23 triliun.
- Desember 2020, manajemen berjanji pencairan klaim nasabah berstatus habis kontrak (HK) dengan nilai di bawah Rp 10 juta.
- Januari 2021, dalam permohonan dan putusan judicial review di MK yang diajukan oleh BPA Bumiputera ke Mahkamah Konstitusi tertera, aset perusahaan mutual itu sebesar Rp 10,1 triliun hingga Juni 2020.

Sumber: Riset KONTAN

■ PRODUK UNITLINK

Asuransi Jiwa Menggenjot Penjualan Unitlink

JAKARTA. Meski ada pandemi Covid-19 yang mengakibatkan minimnya pertemuan antara agen asuransi dengan nasabah, tak membuat kinerja industri asuransi melemah. Terlihat dari hasil kinerja perusahaan asuransi jiwa memajukan unitlink.

BNI Life misalnya, berhasil mencatatkan kenaikan pendapatan premi pada produk asuransi berbalut investasi tersebut sepanjang tahun 2020. Direktur Keuangan BNI Life, Eben Eser Nainggolan mengatakan, sepanjang tahun 2020 BNI Life berhasil memperoleh premi unitlink sebesar Rp 1,82 triliun.

Pencapaian itu naik 10% dibandingkan tahun 2019 yang sebesar Rp 1,65 triliun. "Tahun 2020 produk asuransi unitlink yang berbasis pendapatan tetap relatif lebih bagus diban-

dingkan produk yang berbasis saham," kata Eben kepada KONTANSelasa (2/2).

Sementara di tahun ini, BNI Life memproyeksikan premi unitlink sebesar Rp 1,9 triliun. Sementara hasil investasi produk unitlink di tahun ini, BNI Life memproyeksikan sebesar Rp 680 miliar.

Di tahun ini produk unitlink berbasis saham bisa mencapai kinerja lebih tinggi, meski memiliki volatilitas yang tinggi. "Strategi investasi unitlink tahun ini tetap akan menjaga kualitas underlying asset investasi, baik untuk obligasi dan saham terutama dengan menambah alokasi pada saham-saham *big caps*," terang Eben.

Sementara PT Asuransi Jiwa Generali menyebutkan kalau hasil investasi produk unitlink nasabah naik di atas

kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Marketing and Communication Group Head Generali Indonesia, Vivin Arbianti Gautama menyatakan, pada Desember 2020, sebanyak 99% dari seluruh polis unitlink nasabah, porsi kinerja investasinya berada di atas IHSG. Bahkan di antaranya bisa mencapai 27% di atas IHSG.

"Data ini diambil dari kinerja lebih dari 40.000 polis nasabah yang melakukan aktivasi fitur Robo ARMS sejak fitur tersebut diluncurkan pada Januari 2019 sampai 30 November 2020," jelas Vivin. Asuransi Generali masih terus melakukan penetrasi terhadap produk-produk asuransi unitlink, dengan menjual secara digital.

Selvi Mayasari



KONTAN/Carolus Agus Waluyo

Di tahun ini produk unitlink berbasis saham bisa mencapai kinerja yang lebih tinggi meski memiliki volatilitas yang tinggi.

7. Pemegang Polis Tuntut Pembubaran Direksi AJB Bumiputera
Cnnindonesia.com / 02-02-2021

Pemegang Polis Tuntut Pembubaran Direksi AJB Bumiputera

CNN Indonesia | Selasa, 02/02/2021 16:53 WIB

Bagikan :  



Perkumpulan Pemegang Polis AJB Bumiputera 1912 menuntut pembubaran direksi, komisaris, dan Badan Perwakilan Anggota (BPA) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ilustrasi. ((CNN Indonesia/Safir Makki).

Jakarta, CNN Indonesia -- Perkumpulan Pemegang Polis Asuransi Jiwa Bersama atau **AJB Bumiputera** 1912 menuntut pembubaran direksi, komisaris, dan Badan Perwakilan Anggota (BPA) yang sedang menjabat saat ini. Desakan mereka sampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (**OJK**).

Hal ini demi mendorong penyelesaian *outstanding* klaim yang belum terbayar sampai sekarang. Penasihat Perkumpulan Pemegang Polis AJB Bumiputera Jaka Irwanto mengatakan pihaknya mengusulkan kepada OJK untuk membentuk BPA atau Rapat Umum Anggota (RUA). Sebab, masa jabatan BPA saat ini sudah habis.

"Kami usulkan bentuk BPA/RUA ke OJK. Usulan untuk di *fit and proper test*," ucap Jaka kepada CNNIndonesia.com, Selasa (2/2).

Setelah BPA baru terbentuk, maka bisa memilih dewan direksi dan dewan komisaris baru. Beberapa usulan nama BPA dari pemegang polis, antara lain Terang Muli Sembiring, Ratna Akiefnawati, Darman Syafel, Jefry Rasyid, Dwi Christianto, Boyamin, Priyo Santoso, Nengah Sumarjana, Muhammad Suriansyah, Sirajudin, dan Muhi B Hi Ibrahim.

Sementara, dalam laman resmi AJB Bumiputera, BPA saat ini terdiri dari Nurhasanah, Gede Sri Darma, dan Ibnu Hajar. Lalu, dewan komisaris terdiri dari Zainal Abidin dan Erwin Situmorang.

Kemudian, Direktur Keuangan dan Investasi merangkap Plt Direktur Utama diisi oleh Faizal Karim, Wirzon Sofyan sebagai Direktur Kepatuhan, serta Gatot Subagyo sebagai Direktur Pemasaran.

"Dia (Faizal) 'memproklamkan' sebagai Direktur Utama dan Direktur Keuangan, sekaligus merangkap Komisaris Independen. BPA juga merasa masih menjabat padahal sudah habis masa kerjanya," kata Jaka.

Menurutnya, komisaris, direksi, hingga BPA hanya ingin 'makan gaji buta'. Sebab, tak ada yang bisa dikerjakan oleh komisaris, direksi, dan BPA saat ini.

"Mereka juga ditolak spesimen tanda tangan di Bank BNI. Terus mana mungkin bisa bayar klaim. Spesimen tanda tangan dibutuhkan untuk semua pengeluaran uang selain gaji karyawan," jelas Jaka.

Sementara, Jaka mengklaim pengangkatan Faizal sebagai Direktur Utama, Wirzon sebagai Direktur Kepatuhan, dan Gatot sebagai Direktur Pemasaran pada Juli 2020 lalu oleh BPA bersifat legal. Pasalnya, BPA saat itu sudah habis masa kerjanya.

"BPA habis masa kerja Desember 2019, diperpanjang satu tahun lewat PP Nomor 87 Tahun 2019 dan masa kerja BPA habis 2030. Setelah MK mencabut PP, berarti mereka habis masa kerjanya Desember 2019," ucap Jaka.

CNNIndonesia.com sudah mencoba menghubungi Sekretaris Perusahaan AJB Bumiputera Hery Dermawansyah untuk menanyakan perihal tuntutan pemegang polis kepada OJK. Namun, belum ada respons hingga berita ini diturunkan.

8. PT Asuransi Allianz Life Indonesia Catat Peningkatan Klaim Asuransi Jiwa dan Kesehatan Terkait Covid-19
[Bisnis.com](https://bisnis.com) / 01-02-2021

PT Asuransi Allianz Life Indonesia Catat Peningkatan Klaim Asuransi Jiwa dan Kesehatan Terkait Covid-19



Abdurachman

01 Februari 2021 22:01 WIB



Sampai pertengahan Januari 2021, Allianz Life Indonesia telah membayarkan klaim asuransi jiwa dan kesehatan terkait Covid-19 sebesar lebih dari Rp141 miliar.



Bisnis.com, JAKARTA - PT Asuransi Allianz Life Indonesia mencatat terjadi peningkatan untuk klaim asuransi jiwa dan kesehatan yang terkait dengan Covid-19.

Sampai pertengahan Januari 2021, Allianz Life Indonesia telah membayarkan klaim asuransi jiwa dan kesehatan terkait Covid-19 sebesar lebih dari Rp141 miliar.

Selain itu Allianz memberikan perluasan manfaat pertanggungan terkait Covid-19 untuk nasabah salah satunya menanggung pembiayaan isolasi mandiri jika dirawat di fasilitas bukan rumah sakit atau di hotel rujukan pemerintah melalui sistem reimbursement.

9. Laba Terbang, BTN Siap Caplok Asuransi Jiwa & Modal Ventura
[Cnbcindonesia.com](https://www.cnbcindonesia.com) / 02-02-2021

Laba Terbang, BTN Siap Caplok Asuransi Jiwa & Modal Ventura

MARKET - Monica Wareza, CNBC Indonesia | 02 February 2021 14:00

SHARE |  



Foto: Direktur Finance, Planning, & Treasury Bank BTN, Nixon L.P. Napitupulu

Jakarta, CNBC Indonesia - Emiten BUMN spesialis KPR, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) menargetkan untuk bisa memiliki perusahaan asuransi jiwa dan modal ventura (*venture capital/VC*) untuk mendukung pengembangan bisnis perusahaan ke depan.

Pengembangan ini masuk dalam rencana pertumbuhan bisnis perusahaan di 2021. Hal ini disampaikan Plt. Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu dalam rapat bersama dengan Komisi XI DPR RI, Selasa (2/2/2021).

Nixon mengatakan memiliki perusahaan asuransi jiwa ini *inline* dengan *core business* BTN yang memberikan kredit pemilikan rumah (KPR) yang harus didukung dengan asuransi dan *bancassurance*.

"Bagaimana kerja sama strategi pertumbuhan anorganik terutama sekali kami ingin sekali memiliki satu perusahaan asuransi jiwa karena pada umumnya kredit itu harus ditutup asuransi jiwanya, juga *bancassurance* dan sebagainya," kata dia.

Selanjutnya, rencana untuk memiliki VC ini ditujukan untuk memberikan pendanaan kepada perusahaan *asset management* (AM) atau manajer investasi.

Nixon mengatakan AM ini nantinya akan ditujukan untuk membangkitkan bisnis penjualan rumah *second*. Bisnis ini ditujukan untuk menampung kredit bermasalah (*non performing loan/NPL*) yang lumayan besar.

"BTN saat ini memiliki NPL rumah cukup besar dimana kami memerlukan 1 *asset management company* yang akan fokus jual beli rumah terutama rumah yang bermasalah sehingga NPL-nya bisa didorong keluar dan industri rumah *second* menjadi tumbuh," terang dia,

Tahun lalu, Bank Tabungan Negara mencatatkan kinerja laba bersih *unaudited* senilai Rp 1,61 triliun. Nilai ini naik signifikan, mencapai 671,6% dibandingkan kinerja laba bersih perusahaan sepanjang 2019 yang hanya mencapai Rp 209 miliar.

Nixon mengatakan kinerja yang sangat baik ini berhasil dicapai perusahaan setelah pada 2019 perusahaan melakukan pembersihan besar-besaran atas performa perusahaan sebelumnya.

Rencana ini bukan barang baru karena pejabat sebelumnya sudah menargetkan rencana ini masuk dalam agenda BTN.

Pada 2019 misalnya, Direktur Utama BTN kala itu, Maryono mengatakan BTN akan melakukan tiga rencana pengembangan anorganik di tahun tersebut. Pertama, akuisisi manajer investasi (MI). Kedua, menambah anak usaha dalam bidang asuransi.

Ketiga, bagaimana melepas atau spin off untuk unit usaha syariah (UUS).

10. **BTN Bakal Akuisisi Perusahaan Asuransi Jiwa dan Modal Ventur**
[Republika.co.id](https://republika.co.id) / 02-02-2021

Home > Ekonomi > Ekonomi

BTN Bakal Akuisisi Perusahaan Asuransi Jiwa dan Modal Ventur

Selasa 02 Feb 2021 18:21 WIB

Rep: Novita Intan/ Red: Nidia Zuraya



Petugas menghitung uang dolar Amerika Serikat di gerai penukaran mata uang Bank BTN Jakarta (ilustrasi).

Foto: ANTARA FOTO

Rencana akuisisi ini akan direalisasikan BTN pada tahun ini.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berencana memiliki perusahaan asuransi jiwa dan modal ventura pada tahun ini. Adapun langkah ini untuk mendorong pengembangan bisnis perseroan ke depannya.

Plt Direktur Utama **BTN** Nixon Napitupulu mengatakan pengembangan bisnis perusahaan asuransi jiwa dan modal ventura sudah masuk dalam rencana bisnis bank pada tahun ini.

"Bagaimana kerja sama strategi pertumbuhan anorganik. Kami ingin sekali memiliki satu perusahaan asuransi jiwa karena pada umumnya kredit harus ditutupi asuransi jiwa dan bancassurance dan sebagainya," ujarnya saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR secara virtual, Selasa (2/2).

Nixon menjelaskan jika perseroan memiliki asuransi jiwa maka *core business* BTN yang memberikan kredit pemilikan rumah (KPR) dapat didorong oleh perusahaan asuransi dan *bancassurance*.

Sedangkan tujuan perseroan juga memiliki perusahaan modal ventura untuk memberikan pendanaan kepada perusahaan asset management (AM) atau manajer investasi. Nantinya perusahaan asset management akan ditujukan untuk membangkitkan bisnis penjualan rumah second.

"Bisnis ini ditujukan untuk menampung kredit bermasalah yang lumayan besar," ucapnya.